



**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2024**

**(RENJA)**

DINAS TENAGA KERJA  
KOTA PONTIANAK

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dilakukan sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang di dalamnya tertuang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya di tetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Menyadari pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag / Kasubbid di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan yang diharapkan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama seluruh unit yang tergabung dalam Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk memperoleh kinerja yang baik pada periode berikutnya. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak akan terus berupaya untuk berkarya dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pontianak, 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kota Pontianak

**ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670704 199403 1 019

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	22
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD .....	24
2.3.1 Permasalahan Dan Hambatan Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi OPD.....	26
2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/International Seperti SPM Dan MDGS (Millenium Development Goals)	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	30
<b>BAB III</b> TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD .....	31
3.2 Program dan Kegiatan .....	32
<b>BAB IV</b> RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	37
<b>BAB IV</b> PENUTUP .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renja-PD

Melalui tahapan ini persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan rancangan Renja-PD.

Pada tahapan ini penyusunan rancangan diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja-PD yang mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Rancangan Renja-PD dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

3. Penetapan Renja-PD.

Tahapan ini dimana penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Renja-PD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 memuat berbagai program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja utama;

- b) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja renstra;
- c) Program dan kegiatan harus mendukung Visi, Misi Walikota Pontianak.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
  14. Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
  15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perubahan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 19);
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 21);

21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
5. Sebagai alat pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Pada sub ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja Dinas Tenaga Kerja dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Tenaga Kerja, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota.

#### 1.2. Landasan Hukum.

Berisikan tentang penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

#### 1.4. Sistematika Penulisan.

Berisikan tentang uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN LALU.**

Bab ini menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja tahun lalu dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1). Bab ini terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.*

Sub-bab ini menyajikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD 2023, dimana selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun sebelumnya.

2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.*

Pada Sub-bab ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. *Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.*

Pada Sub-bab ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan hal kritis terkait dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Global, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinasserta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

#### 2.4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD.*

Melalui Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.*

Sub-bab ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dengan menyajikan penjelasan tentang proses usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas tenaga kerja Kota Pontianak.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK.**

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Pada Sub-bab ini memuat berisikan tentang telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Pada Sub-bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang dikaitkan dengan Sasaran target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

#### 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Sub-bab ini menyajikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.**

Pada bab ini menyajikan table rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024.

### **BAB V. PENUTUP.**

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (Outcome) dan indikator kinerja kegiatan (Output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu, dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja sub kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2022.



Tabel 2.1.  
Perbandingan Realisasi Serta Capaian  
Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	Rasio penduduk Yang Bekerja	89,30 – 89,98%	90,87%	100,93%
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB)	52%	59,45%	118,37%
3	Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan	68%	28,28%	45,61%

**Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak**

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

1). Rasio penduduk yang bekerja

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utamapada sasaran rasio penduduk yang bekerja dengan target 90,03%, dimana realisasi indikatornya sebesar 90,87%. Dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator rasio penduduk yang bekerja masuk pada katagori “*Sangat Berhasil*”.

2). Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB)

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utama pada sasaran besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB) dengan target 50,22%, dimana realisasi indikatornya di tahun 2021 sebesar 59,45%. Pada tahun 2021 realisasi melebihi target yang sudah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM terhadap pelayanan DPMTKPTSP masuk pada katagori “*Sangat Berhasil*”.

3). Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan

Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utama pada sasaran besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan dengan target 62%, dimana realisasi indikatornya sebesar 28,28%. Pada indikator ini realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan masuk pada kategori “*Tidak Berhasil*”.

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun  
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2022



Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2020-2024, pelaksanaan anggaran tahun 2024 berdasarkan renstra OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<b>Rp. 156.400. 000</b>

Untuk mencapai sasaran dimaksud dilaksanakan sebanyak 4 program, Adapun program tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

Program Perencanaan Tenaga Kerja

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan target indikator yang ingin dicapai persentase tersusunnya Rencana Tenaga Kerja sebesar 100 %, Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan indikator capaian yaitu jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang disusun sebanyak 1 dokumen.
- Penyusunan rencana tenaga kerja mikro dengan indicator capaian yang ingin dicapai jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja mikro sebanyak 20 perusahaan,

Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/ Kota

Capaian kinerja kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/ Kota ditargetkan 100%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

- a) Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja dengan indikator kinerja yang ditargetkan yaitu jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi sebanyak 2 Orang.
- b) Pelayanan antar kerja, target yang ingin dicapai jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD sebanyak 200 Orang.
- c) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.  
Capaian kinerja yang ditargetkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebanyak 150 Orang.
- d) Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, capaian kinerja yang ditargetkan jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD sebanyak 10 Orang.
- e) Perluasan kesempatan kerja, capaian kinerja yang ditargetkan yaitu jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja sebanyak 120 Orang.
- b. Penertiban izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), target indikator yang ingin dicapai yaitu persentase terlaksananya penertiban izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebanyak 100%. Dengan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - a) Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi dengan indikator kinerja jumlah perizinan LPTKS yang terintegrasi sebanyak 5 lembaga.
  - b) Pengawasan dan pengendalian LPTKS, target yang ingin dicapai yaitu jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan

dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku sebanyak 5 lembaga.

c. Perlindungan PMI di daerah dengan target yang ingin dicapai persentase terlaksananya perlindungan PMI sebesar 100 %, dengan melaksanakan sub kegiatan diantaranya :

a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI) sebanyak 15 Orang.

b) Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran target yang ditetapkan sebanyak 4 Orang.

c) Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan, target yang ditetapkan sebanyak 10 Orang.

d. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ditargetkan 100%, Adapun sub kegiatan yang ingin dicapai yaitu :

a) Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online dengan target indikator sebanyak 1 dokumen.

b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online sebanyak 400 Orang.

c) Job Fair/ Bursa Kerja

Capaian kinerja Sub kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja ditargetkan 800 orang.

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi target yang ingin dicapai sebesar 54 %,

dengan indikator sasaran yaitu persentase pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Melalui kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 sub kegiatan, diantaranya :

- a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun -n sebanyak 230 Orang.
- b) Koordinasi lintas lembaga dan Kerjasama dengan sector swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prsarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun -n sebanyak 40 lembaga.

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Capaian kinerja kegiatan Persentase terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta sebesar 100 %, dengan melaksanakan sub kegiatan sebanyak 1 diantaranya :

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Capaian kinerja Sub kegiatan jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina sebanyak 40 lembaga

c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Capaian kinerja yang ingin dicapai yaitu persentase terlaksananya perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebesar 100 %, dengan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi sebanyak 10 lembaga.

- d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.  
Capaian kinerja yang ditargetkan yaitu persentase terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil sebesar 100%, dengan melaksanakan sub kegiatan yaitu :
- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil sebanyak 10 perusahaan.
- e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota.  
Capaian kinerja yang ditergetkan yaitu persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota sebesar 100 %, dengan melaksanakan sub kegiatan yaitu pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebanyak 10 dokumen.

#### Program Hubungan Industrial

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kota Pontianak  
Capaian kinerja kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kota Pontianak ditargetkan 100%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :
- a) Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, target yang ditetapkan yaitu sebanyak 40 perusahaan.
  - b) Pendaftaran perjanjian Kerjasama bagi perusahaan target yang ingin dicapai sebanyak 20 perusahaan.
  - c) Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga



kerja serta pengupahan, target yang ingin dicapai sebanyak 4 lembaga.

- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota, dengan target capaian sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) diantaranya :
  - a) Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota, dengan target yang ingin dicapai sebanyak 12 perkara.
  - b) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, target yang ingin dicapai 30 perkara.
  - c) Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi, target yang ingin dicapai 4 asosiasi dan serikat pekerja.
  - d) Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota, target yang ditetapkan yaitu 1 lembaga.
  - e) Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja, taget yang ditetapkan sebanyak 3.000 Orang.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menempati gedung terpadu Kota Pontianak yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 1 Pontianak, yang menyatu dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak.

Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan sasaran program pada Renstra 2020-2024 yang diukur melalui indikator kinerja utama yang tertuang ke dalam perjanjian kinerja, pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (sebelumnya merupakan bidang tenaga

kerja sehingga data didapat dari Renstra Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024) adalah dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak merupakan penyelenggara pelayanan dengan komitmen pelayanan prima sesuai dengan prinsip mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Dinas Tenaga Kerja melayani jenis pelayanan diantaranya :

1. Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/1);
2. Perpanjangan Kartu AK/1);
3. Penerbitan Surat Rekomendasi Paspor calon pekerja migran Indonesia (CPMI);
4. Penerbitan surat izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS);
5. Penerbitan surat rekomendasi usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS);
6. Penerbitan surat rekomendasi pendirian perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI);
7. Penerbitan surat rekomendasi perpanjangan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI);
8. Penerbitan surat verifikasi dokumen identitas diri (ID) Medical chek up ca;on pekerja migran Indonesia;
9. Surat keterangan jalan antar kerja antar daerah (AKAD);
10. Tanda daftar bursa kerja khusus (BKK);
11. Penyelesaianperselisihanhubunganindustrial/pemutusan hubungan kerja;
12. Pengesahan peraturan perusahaan (PP);
13. Pendaftaran perjanjian kerja Bersama (PKB);
14. Pencataatan pendaftaran perjanjian alih daya;
15. Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu;

16. Pengesahan lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;
17. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB).

### 2.3. Isu – Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang.

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak antara lain adalah :

#### 1. Angka pengangguran terbuka yang tinggi

Angka pengangguran yang tinggi disebabkan beberapa hal yaitu ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, kemajuan teknologi, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai, kurangnya pendidikan dan keterampilan, tingkat kemiskinan, adanya PHK, tempat tinggal yang jauh, pasar global, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan, dan tingginya harapan para calon pekerja.

#### 2. Pemberdayaan difabel dalam dunia kerja

Diperlukan pemberdayaan difabel dalam dunia kerja agar jumlah pengangguran di kalangan difabel dapat

menurun. faktor penyebab yang membuat kalangan difabel sulit bekerja antara lain kurangnya informasi mengenai kesempatan kerja, rendahnya pendidikan dan pelatihan, keengganan mendaftarkan diri karena penyandang disabilitas, tidak tergugah untuk melamar karena pengalaman kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan dan atau citra negatif yang sudah tertanam, bantuan personal atau teknis yang tidak memadai, pengurangan jumlah pegawai di perusahaan besar dan pelayanan umum, semakin menurunnya kebutuhan akan pekerja yang tidak memiliki keterampilan, kurangnya kesadaran di antara para pengusaha akan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, ketakutan akan tingginya biaya jaminan kesejahteraan dan kekhawatiran akan kecelakaan dan biaya asuransi.

### 3. Ketidaksesuaian Skill Angkatan Kerja dan Kebutuhan Industri

Skil yang paling dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah memiliki pemikiran analitis dan inovatif, aktif dan memiliki strategi belajar, pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis dan analisis, memiliki kreativitas, orisinalitas dan inisiatif, kepemimpinan dan pengaruh sosial, mahir teknologi, pandai dalam desai teknologi dan pemrograman, memiliki daya tahan dan pandai mengatur stres dan fleksibel, Memiliki nalar pikir dalam merumuskan ide dan solusi.

### 4. Peluang kerja di luar negeri

Faktor pendorong pemerintah mengambil kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri adalah karena semakin kompleksnya masalah kependudukan yang

terjadi di dalam negeri dengan berbagai implikasi sosial ekonominya seperti masalah pengangguran, menyebabkan harus ditempuh langkah-langkah inovatif untuk berusaha mengurangi tekanan masalah tersebut. Selain itu, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara lain dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Kesempatan kerja tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja juga menawarkan tingkat penghasilan dan fasilitas menarik dibandingkan dengan kerja di dalam negeri.

#### 5. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut ketenagakerjaan yang mengatur tentang Upah, Kontrak Kerja, Pelatihan, Pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Program Jaminan Kehilangan Kerja. Akan tetapi isu yang menyebar di kalangan masyarakat adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lebih berpihak pada Perusahaan dibandingkan tenaga kerja. Hal ini dapat mengganggu harmonisasi hubungan antar pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap memperburuk situasi di tengah kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidak stabil dengan lebih tidak berpihak kepada para pekerja dan mempermudah PHK.

#### 2.4. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pontianak terkait pelayanan ketenagakerjaan di Kota Pontianak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

##### 1. Angka Pengangguran Terbuka masih tinggi

2. Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja
3. Peluang kerja di Luar Negri
4. Masih ada Perusahaan pengguna tenaga kerja yang tidak melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker
5. Masih banyak Perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama.

Berikut digambarkan tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak:

Tabel 2.5.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka pengangguran terbuka masih tinggi	Masih banyaknya Pengangguran	Pencari kerja tidak mendapatkan informasi/pengetahuan dan pemahaman tentang lowongan kerja
		Tingkat kemiskinan masih tinggi	Tingkat Pendidikan yang rendah
		Pengetahuan, Pendidikan dan keterampilan belum memenuhi standar	Keahlian/Kompetensi yang rendah
2	Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja	Masih banyak perusahaan yang tidak mau mempekerjakan tenaga kerja difabel	Perusahaan masih kurang memperhatikan/kekhawatiran bahwa difabel tidak dapat bekerja secara optimal
3	Peluang kerja di luar negri	Pekerja Migran Indonesia masih banyak yang ilegal	Kesadaran dan pengetahuan yang minim
4	Masih ada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja yang Tidak Melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker	Masih banyaknya pengangguran	Kurangnya kesadaran perusahaan

		Pencari Kerja tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas	Kurangnya koordinasi dan sinergi antara perusahaan dengan Disnaker
		Penempatan tenaga kerja belum terdata oleh Disnaker	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku
5	Masih banyak perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama	Adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan	Kurangnya kesadaran perusahaan Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku

Dinas Tenaga Kerja harus terus mendorong dan bekerja sama dengan Perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Bersama agar hubungan antara Perusahaan dan Pkerjanya menjadi lebih baik dan dapat mengurangi tingkat permasalahan antara Perusahaan dan pkerjanya.

2.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti SPM dan MDGS (Millenium Development Goals)

A. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi Kota Pontianak, maka tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan mengacu pada amanat RPJM Provinsi Kalimantan Barat, maka visi pembangunan Kepala Daerah adalah :

**“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN  
LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”**

B. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Sesuai dengan visi “Pontianak kota khatulistiwa, berwawasan lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”, maka telah ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024, yang disusun dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
- Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.
- Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Mengacu pada misi ke 4 (empat) tersebut diatas, maka ada beberapa faktor pendorong yang sangat dimungkinkan untuk pencapaian misi tersebut melalui visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yaitu :

1. Kota Pontianak adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa.
2. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat
3. Investasi di Kota Pontianak yang cukup kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pontianak.
4. Adanya kebijakan yang dituangkan dalam peraturan berupa kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan izin.

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama untuk misi ke 4 adalah kualitas dan kompetensi SDM yang kurang memadai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan melalui misi nomor 4 (empat) yaitu “*Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing*”.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program prioritas pembangunan Kota Pontianak merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Adapun pagu anggaran/pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak meliputi belanja langsung yang meliputi komponen belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Belanja langsung meliputi kegiatan rutin penunjang Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan termasuk belanja kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan usulan/rencana kerja kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan. Dinas Tenaga Kerja Kota

Pontianak tidak ada mengampu usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK**

##### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024-2026 yaitu, Meningkatkan kesempatan kerja. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yaitu, Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator tujuan tingkat pengangguran terbuka dan indikator sasarannya adalah tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel. 3.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%	8,20-10,20%	8,15-10,15%
		Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 156.400.000	Rp. 160.109.000	Rp. 155.418.000

Tabel di atas menggambarkan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Tenaga Kerja yaitu Meningkatkan kesempatan kerja dengan sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan indikator tujuan tingkat pengangguran terbuka dan indikator sasaran tingkat produktivitas tenaga kerja.

### 3.2 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD Dinas tenaga Kerja memiliki sebanyak 5 program dan 19 kegiatan yang dijabarkan kedalam sebanyak 54 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

#### I. Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK).

##### 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

#### II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

### 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi
- Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.

### 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

### 3. Perizinan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi

### 4. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil

### 5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota

- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

## III. Program Penempatan Tenaga Kerja.

### 1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota

- Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
- Pelayanan antar kerja
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
- Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan
- Perluasan Kesempatan Kerja

### 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi
- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

### 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online
- Job Fair/ Bursa Kerja

4. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
  - Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia [PMI]
  - Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran
  - Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan

#### IV. Program Hubungan Industrial.

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
  - Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
  - Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan
  - Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota
  - Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi
  - Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

## V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penanatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
7. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Mempedomani RPD Kota Pontianak Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam penyusunan rencana kerja, dengan memperhatikan nomenklatur sub-kegiatan dengan indikator kinerjanya. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024 mencangkup rencana kerja sebanyak 5 program, 19 kegiatan, dan 53 sub-kegiatan. Terkait pendanaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan penyesuaian terkait sumber dana, menjadi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, terkecuali untuk sub-kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, gaji ASN bersumber pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

Umum, sedangkan tunjangan ASN bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.704.246.00,. Adapun rincian rumusan program dan kegiatan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 berikut :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024 mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Pontianak tahun 2024-2026 serta Indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi batu loncatan pada tujuan dan sasaran RPJMD. Maka dari itu, setiap Perangkat Daerah harus menetapkan parameter kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya, yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi sebagai syarat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi patokan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak di dalam pelaksanaan kinerja dan pembangunan satu tahun ke depan.

Pontianak, 2023  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kota Pontianak

**ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670704 199403 1 019



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (000)					Realisasi Capaian pada Tahun (000)					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	-	V	-	-	-	Rp.145.970	Rp.149.758	Rp.156.400	-	-	Rp.145.970	-	-	-	-	100 %	-	-
2.	Rasio Penduduk yang Bekerja	-	V	-	90,03 %	90,2 %	91 %	90,08 %	89,75-91,65	87,64 %	87,62 %	90,08 %	-	-	97,35 %	97,14	98,99 %	-	-
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	V	-	-	-	-	64,82%	68,82%	60,05%	61,94 %	64,82%	-	-	-	-	-	-	-
4.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	-	V	-	30	30	30	90 %	200	30	30	30	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-
5.	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	-	V	-	-	-	36%	68%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	V	-	50,22 %	52%	53%	54,20%	55%	59,45%	94%	86%	-	-	118,38	180,77%	162,26%	-	-
7.	Besaran Pekerja atau Buruh yang menjadi Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan	-	V	-	62%	68%	72%	74%	78%	28,28%	106%	99%	-	-	4.561,29	15.588,24	137,50%	-	-
8.	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	-	V	-	-	-	-	-	95%	90,03%	94,22 %	82,94%	-	-	-	-	-	-	-

---

**Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024**

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.589.454.559	8.587.460.539	633.634.120	3.990.545.128	3.535.388.000	8.633.405.871	8.091.418.630	525.559.668	-	-	90%	94%	83%	-	-	10,45	6,27
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	-	-	-	-	38.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.100.000	217.874.208	14.355.100	236.331.300	556.000.000	5.100.000	217.870.208	14.355.100	-	-	100%	99%	100%	-	-	4.172	4.171
4	Program Penempatan tenaga Kerja	289.907.000	2.700.600	-	-	284.000.000	229.828.810	2.700.600	-	-	-	79%	100%	-	-	-	99	98,82
5	Program Hubungan Industrial	13.204.000	168.303.977	25.596.800	214.020.000	290.858.000	11.856.000	162.164.977	25.126.800	-	-	90%	275%	98%	-	-	1.174	3.798



TABEL. 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA  
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA s/d TAHUN 2023  
KOTA PONTIANAK**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026	TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARFET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI I TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)</b>	<b>TINGKAT PARTISIPASI ANGGARAN KER</b>	<b>69 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>65 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (R</i>	<i>Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTE)</i>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	90 Perusaha an	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0 Perusaha an	
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI</b>	<b>58 %</b>	<b>50 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>52.00%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2 07 03 2.01	<i>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi</i>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>52.00%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	780 Orang	30 Orang	0 Orang	0%	90 Orang	0 Orang	0%
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan	120 Lembaga	38 Lembaga	0 Lembaga	0%	38 Lembaga	0 Lembaga	0%
2 07 03 2.02	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	125 Lembaga	38 Lembaga	0 Lembaga	0%	0 Lembaga	Lembaga	
	<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>	<i>Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	45 Perizinan	0 Perizinan	0 Perizinan	0%	0 Perizinan	0 Perizinan	0%
	<i>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	<i>Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>
	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	45 Perusaha an	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0%	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0%
	<i>Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>
	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	45 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI</b>	<b>45 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>68 %</b>	<b>%</b>	
	<i>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	
	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan	9 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	900 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	520 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026	TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARTFET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	45 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan	400 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100 %</b>	<b>%</b>	
	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	21 Lembaga	Lembaga	Lembaga		0 Lembaga	0 Lembaga	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	21 Lembaga	Lembaga	Lembaga		0 Lembaga	0 Lembaga	
	<b>Pengelolaan informasi pasar kerja</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100 %</b>	<b>%</b>	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	
	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online	1,800 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	3,000 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	<b>Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna di daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100 %</b>	<b>%</b>	
	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Jumlah CPMI/PMI yang diindungi dan ditingkatkan kompetensinya	60 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI	10 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	36 Orang	Orang	Orang		0 Orang	0 Orang	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN</b>	<b>57 %</b>	<b>53 %</b>	<b>%</b>		<b>54.20 %</b>	<b>%</b>	
	<b>Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100 %</b>	<b>%</b>	
	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	150 Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan		60 Perusahaan	0 Perusahaan	
	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	100 Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan		0 Perusahaan	0 Perusahaan	
	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta perusahaan	12 Laporan	Laporan	Laporan		0 Laporan	0 Laporan	
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100 %</b>	<b>%</b>	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026	TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARFET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI I TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah	Jumlah perselisihan yang dicegah	30 Perkara	Perkara	Perkara		12 Perkara	0 Perkara	
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	84 Perkara	Perkara	Perkara		0 Perkara	0 Perkara	
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	15 Asosiasi & Serikat Pekerja	Asosiasi & Serikat Pekerja	Asosiasi & Serikat Pekerja		0 Asosiasi & Serikat Pekerja	0 Asosiasi & Serikat Pekerja	
	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	3 Lembaga	Lembaga	Lembaga		1 Lembaga	0 Lembaga	
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	9000 Orang	Orang	Orang		2,800 Orang	0 Orang	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB /</b>	<b>Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh</b>	<b>95 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>95 %</b>	<b>%</b>	
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>	<b>33.33%</b>	<b>33.33%</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	Dokumen	Dokumen		15 Dokumen	5 Dokumen	33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Laporan	Laporan	Laporan		6 Laporan	2 Laporan	33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27 Laporan	Laporan	Laporan		9 Laporan	3 Laporan	33%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>	<b>67.57%</b>	<b>67.57%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	69 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Orang / Bulan		20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	100%
	Pelaksanaan Penanatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	15 Dokumen	Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	40%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	36 Laporan	Laporan	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	25%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>		<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	3 Paket	Paket	Paket		3 Paket	0 Paket	0%
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang	Orang	Orang		8 Orang	0 Orang	0%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.	6 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	0 Paket	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan.	6 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	2 Paket	1 Paket	



**Tabel 2.6**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kota Pontianak**

DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	3,535,388,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	3,535,388,000	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15,360,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15,360,000	-
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8,160,000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8,160,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4,500,000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2,700,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2,700,000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3,121,776,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	100%	3,121,776,000	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	2,858,246,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	2,858,246,000	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	259,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	259,000,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4,530,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4,530,000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	100%	54,642,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	100%	54,642,000	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	42,642,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	42,642,000	-
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	12,000,000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	12,000,000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum	100%	135,200,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum	100%	135,200,000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4,200,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4,200,000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	42,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	42,000,000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	12,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	12,000,000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	32,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	32,000,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	14,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	14,000,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	31,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	31,000,000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	64,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	64,000,000	-
	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	5 Unit	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	5 Unit	20,000,000	-

	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	20,000,000	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	24,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Pontianak	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	24,000,000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	66,410,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	66,410,000	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2,410,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2,410,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	42,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	42,000,000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	22,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	22,000,000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	78,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	78,000,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36,000,000	-
	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	12,000,000	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	12,000,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	18,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	18,000,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	12,000,000	-
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA RIJK	Kota Pontianak	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	65%	38,000,000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)	Kota Pontianak	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	65%	38,000,000	-
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	38,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	38,000,000	-
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	18,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	18,000,000	-
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	20 Perusahaan	20,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	20 Perusahaan	20,000,000	-
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Pontianak	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	54%	556,000,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Pontianak	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	54%	556,000,000	-
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	54%	465,000,000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	54%	465,000,000	-
	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	230 Orang	450,000,000	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	230 Orang	450,000,000	-
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	15,000,000	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	15,000,000	-
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	100%	50,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	100%	50,000,000	-
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	40 Lembaga	50,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	40 Lembaga	50,000,000	-
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	13,000,000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	13,000,000	-
	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	10 Perizinan	13,000,000	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	10 Perizinan	13,000,000	-
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	16,000,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	16,000,000	-
	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	10 Perusahaan	16,000,000	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	10 Perusahaan	16,000,000	-
	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	100%	12,000,000	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	100%	12,000,000	-
	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	12,000,000	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	12,000,000	-
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Pontianak	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI	10%	284,000,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Pontianak	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI	10%	284,000,000	-
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	93,000,000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	93,000,000	-
	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	2 Orang	16,000,000	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	2 Orang	16,000,000	-
	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	200 Orang	18,000,000	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	200 Orang	18,000,000	-
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 Orang	26,000,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 Orang	26,000,000	-

	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanangan ULID	10 Orang	15,000,000	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanangan ULID	10 Orang	15,000,000	-
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pontianak	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	120 Orang	18,000,000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pontianak	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	120 Orang	18,000,000	-
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	23,000,000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	23,000,000	-
	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	5 Lembaga	12,000,000	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	5 Lembaga	12,000,000	-
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	5 Lembaga	11,000,000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	5 Lembaga	11,000,000	-
	Pengelolaan informasi pasar kerja	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan	100%	134,000,000	Pengelolaan informasi pasar kerja	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan	100%	134,000,000	-
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	10,000,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	10,000,000	-
	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	400 Orang	12,000,000	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	400 Orang	12,000,000	-
	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	800 Orang	112,000,000	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	800 Orang	112,000,000	-
	Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	100%	34,000,000	Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	100%	34,000,000	-
	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 Orang	11,000,000	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	15 Orang	11,000,000	-
	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSa dan PMI bermasalah yang di tangani	4 Orang	11,000,000	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSa dan PMI bermasalah yang di tangani	4 Orang	11,000,000	-
	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	10 Orang	12,000,000	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	10 Orang	12,000,000	-
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Pontianak	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	55%	290,858,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Pontianak	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	55%	290,858,000	-
	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	100%	36,000,000	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	100%	36,000,000	-
	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	16,000,000	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	16,000,000	-
	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20 Perusahaan	12,000,000	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20 Perusahaan	12,000,000	-
	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	8,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	8,000,000	-
	Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	254,858,000	Pencegahan dan Penyelidikan Hubungan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100%	254,858,000	-
	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perselisihan yang dicegah	12 Perkara	11,000,000	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perselisihan yang dicegah	12 Perkara	11,000,000	-
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	12,000,000	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	12,000,000	-
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	4 Asosiasi & Serikat Pekerja	11,000,000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	4 Asosiasi & Serikat Pekerja	11,000,000	-
	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	203,000,000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	203,000,000	-
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	17,858,000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	17,858,000	-
	<b>Total</b>				<b>4,704,246,000</b>					<b>4,704,246,000</b>	

**TABEL. 3.2**

**RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024**

No	Urusan /Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>							#####		
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>15,360,000</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariata	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase tersedianya dokumen laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Dokumen	100%	8,160,000	Dana Transfer Umum/Dan a Bagi Hasil
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariata	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersedianya dokumen laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Laporan	100%	4,500,000	Dana Transfer Umum/Dan a Bagi Hasil
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariata	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 Laporan	100%	2,700,000	Dana Transfer Umum/Dan a Bagi Hasil
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>3,121,776,000</b>		

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	23 Orang/Bulan	100%	2,858,246,000	PAD /Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen	100%	259,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	4,530,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>54,642,000</b>	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	100%	42,642,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
8	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Orang	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>D Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>135,200,000</b>	



9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	4,200,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	42,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Paket	100%	32,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	14,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	31,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>64,000,000</b>	

15	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Unit	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
17	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Unit	100%	24,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>66,410,000</b>	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	2,410,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
19	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	42,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil

20	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	22,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
----	--	--	---	---	--	------	------------	------	------------	------------------------------------

<b>G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>78,000,000</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	36,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
22	Pemeliharaan mebel	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Unit	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Unit	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Gedung	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)</b>								<b>38,000,000</b>	
<b>H Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>										<b>38,000,000</b>
25	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	1 Dokumen	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil

26	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	20 Perusahaan	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>III</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								<b>556,000,000</b>	
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>								<b>465,000,000</b>	
27	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	Persentase Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	230 Orang	100%	450,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
28	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	Persentase Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	40 Lembaga	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>J</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>								<b>50,000,000</b>	
29	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	40 Lembaga	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>K</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>								<b>13,000,000</b>	
30	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	10 Perizinan	100%	13,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>L</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>								<b>16,000,000</b>	

31	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	10 Perusahaan	100%	16,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>M Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota</b>									<b>12,000,000</b>	
32	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	10 Dokumen	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>								<b>284,000,000</b>	

<b>N Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>										
33	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	2 Orang	100%	16,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
34	Pelayanan Antar Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	200 Orang	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
35	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	150 Orang	100%	26,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
36	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10 Orang	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
37	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	120 Orang	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>O Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>									<b>23,000,000</b>	

38	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	5 Lembaga	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
39	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	5 Lembaga	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>P Pengelolaan informasi pasar kerja</b>									<b>134,000,000</b>	
40	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	1 Dokumen	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
41	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	400 Orang	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
42	Job Fair/ Bursa Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	800 Orang	100%	112,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>Q Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota</b>									<b>34,000,000</b>	



43	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	15 Orang	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
44	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	4 Orang	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
45	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10 Orang	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>V</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>								<b>290,858,000</b>	
<b>R</b>	<b>Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah</b>								<b>36,000,000</b>	
46	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotame mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	40 Perusahaan	100%	16,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil

47	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotame mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	20 Perusahaan	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
48	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS)	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotame mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	4 Laporan	100%	8,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
<b>S Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>									<b>254,858,000</b>	

49	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	Jumlah perselisihan yang dicegah	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	12 Perkara	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
50	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	30 Perkara	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
51	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	4 Asosiasi & Serikat Pekerja	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil

52	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	1 Lembaga	100%	203,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil
53	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	3000 Orang	100%	17,858,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil

**TABEL. 4.1**

**RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 - 2025**

No	Urusan /Bidang Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							#####				#####	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>							#####				#####	
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>15,360,000</b>				<b>15,700,000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariata	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase tersedianya dokumen laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Dokumen	100%	8,160,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	8,200,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariata	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersedianya dokumen laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Laporan	100%	4,500,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	4,700,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariata	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 Laporan	100%	2,700,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	2,800,000
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>3,121,776,000</b>				<b>3,151,446,000</b>	

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	23 Orang/Bulan	100%	2,858,246,000	PAD /Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	2,886,746,000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Dokumen	100%	259,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	260,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	4,530,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	4,700,000
<b>C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>54,642,000</b>				<b>61,200,000</b>
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Paket	100%	42,642,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	43,200,000
8	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 Orang	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	18,000,000
<b>D Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>135,200,000</b>				<b>334,300,000</b>

9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	4,200,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	4,300,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	42,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	65,000,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	40,000,000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Paket	100%	32,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	62,000,000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Paket	100%	14,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	38,000,000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	31,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	125,000,000
<b>E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>64,000,000</b>				<b>111,000,000</b>

15	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Unit	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	33,000,000
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Unit	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	40,000,000
17	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Unit	100%	24,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	38,000,000
<b>F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>66,410,000</b>				<b>78,600,000</b>
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	2,410,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	2,600,000
19	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	42,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	52,000,000



20	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	22,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	24,000,000
----	--	--	---	---	--	------	------------	------	------------	------------------------------------	--	------	------------

<b>G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													<b>78,000,000</b>				<b>105,500,000</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	36,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	38,000,000				
22	Pemeliharaan mebel	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Unit	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	14,000,000				
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Unit	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	32,000,000				
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Gedung	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	21,500,000				
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)</b>								<b>38,000,000</b>				<b>52,000,000</b>				
<b>H</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>								<b>38,000,000</b>				<b>52,000,000</b>				
25	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	1 Dokumen	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67%	24,000,000				

26	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	20 Perusahaan	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67%	28,000,000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								<b>556,000,000</b>				<b>575,000,000</b>
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>								<b>465,000,000</b>				<b>470,000,000</b>
27	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	Persentase Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	230 Orang	100%	450,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	56%	450,000,000
28	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	Persentase Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	40 Lembaga	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	56%	20,000,000
<b>J</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>								<b>50,000,000</b>				<b>50,000,000</b>
29	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	40 Lembaga	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	56%	50,000,000
<b>K</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>								<b>13,000,000</b>				<b>17,000,000</b>
30	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	10 Perizinan	100%	13,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	56%	17,000,000
<b>L</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>								<b>16,000,000</b>				<b>20,000,000</b>

31	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	10 Perusahaan	100%	16,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	56%	20,000,000
<b>M Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota</b>									<b>12,000,000</b>				<b>18,000,000</b>
32	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54%	10 Dokumen	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	56%	18,000,000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>								<b>284,000,000</b>				<b>379,000,000</b>

N Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										93,000,000			115,000,000
33	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	2 Orang	100%	16,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	24,000,000
34	Pelayanan Antar Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	200 Orang	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	24,000,000
35	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	150 Orang	100%	26,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	34,000,000
36	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10 Orang	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	13,000,000
37	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	120 Orang	100%	18,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	20,000,000
<b>O Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>									<b>23,000,000</b>				<b>29,000,000</b>

38	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	5 Lembaga	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	14,000,000
39	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	5 Lembaga	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	15,000,000
<b>P Pengelolaan informasi pasar kerja</b>									<b>134,000,000</b>				<b>196,000,000</b>
40	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	1 Dokumen	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	12,000,000
41	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	400 Orang	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	22,000,000
42	Job Fair/ Bursa Kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	800 Orang	100%	112,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	162,000,000
<b>Q Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota</b>									<b>34,000,000</b>				<b>39,000,000</b>

43	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	15 Orang	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	15,000,000
44	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	4 Orang	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	10,000,000
45	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10 Orang	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Yang Lulus Seleksi	15%	14,000,000
<b>V</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>								<b>290,858,000</b>				<b>365,000,000</b>
<b>R</b>	<b>Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah</b>								<b>36,000,000</b>				<b>82,000,000</b>
46	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotame mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	40 Perusahaan	100%	16,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	56%	22,000,000

47	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotame mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	20 Perusahaan	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	56%	40,000,000
48	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS)	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotame mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	4 Laporan	100%	8,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dergan perjanjian bersama (PB)	56%	20,000,000
<b>S Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>									<b>254,858,000</b>			<b>283,000,000</b>	



49	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	Jumlah perselisihan yang dicegah	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	12 Perkara	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	56%	20,000,000
50	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	30 Perkara	100%	12,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	56%	20,000,000
51	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	4 Asosiasi & Serikat Pekerja	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	56%	14,000,000

52	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	1 Lembaga	100%	203,000,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	56%	204,000,000
53	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	3000 Orang	100%	17,858,000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB)	56%	25,000,000